

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshidiqie, J. (2009). *PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA*. PT RajaGrafindo Persada.
- Asshidiqie, J. (2012). *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika
- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah (pertama)*. Graha Ilmu.
- Achidsti, Ashilly et.al. (2020). *Tata Kelola Pendataan dan Penyaluran BLT-DD Melalui Pasar desa*.
- Chaidir, E. (2007). *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Third Edition. California: Sage publication.
- Deddy Ismatullah. (2007). *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*. Pustaka Setia.
- Gunawan Sumodiningrat (1999), *Agenda Pemulihan Ekonomi, Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat melalui pemberdayaan dan otonomi daerah*, Kipas Putih Aksara, Jakarta.
- Hamzah, Ardi. 2015. *Pengelolaan Pemerintahan Desa: Menuju Desa Mandiri, Sejahtera dan Partisipatoris*. Surabaya: Penerbit Pustaka.
- Indrawati, Sri Mulyani. (2017). *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Sekretariat Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*.
- Marzuki, P. M. (2008) *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Moh Mahfud MD. (n.d.). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)*. Renaka Cipta.
- Prawiradinata, Rudy S. . (2020) *Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa*

(BLT-Dana Desa), Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas).

Rahardjo, S. (n.d.). Ilmu Hukum.

S.Attamimi, A. H. (2014). *Pancasila Cita Hukum Dalam*

Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia, Dalam Buku Pancasila Sebagai Ideologi Yang Disunting Oleh Oetoyo Oesman Alfian (A. H. S.Attamimi (ed.24)). Rajawali Pers.

Satori, Djamar'an. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta Remaja Rosdakarya

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta 2015)

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.* Bandung: Alfabeta.

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah,* Sinar Mulia, Jakarta, 2002, hlm.65.

Yadiman. (2019). *Metode Penelitian Hukum.* Lekkas.

B. Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Permen Desa PDTT 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan No. 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan No 25 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Desa Untuk Penanggulangan Covid 19

Peraturan Bupati Kuningan No. 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan No. 88 Tahun 2019 Tentang Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan Dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2020

C. Sumber Lainnya

- Adrian, Kevin. (2020). Memahami Epidemiologi dan istilah-istilahnya. <https://www.alodokter.com/memahami-epidemiologi-dan-istilah-istilahnya>. 15 Februari 2022.
- Astuti, D., 2021, Gotong Royong sebagai Rujukan dalam Kebijakan Pemberdayaan Desa Tanggap Covid-19 . Titian: Jurnal Ilmu Humaniora, 5(1 SE-), 132–147.
- Ayu, A. A., Siahainenia, R. R., & Kudubun, E. E. (2020). Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 9(2), 551–566. <https://doi.org/10.20961/jas.v9i2.43738>
- Eko, Sutoro. (2020). *Governing* Perbuatan Memerintah. <https://www.youtube.com/watch?v=NG7IQkaJt4Q>. 15 Februari 2022.
- Faturrahman, F., Saleh, M., Pathiassana, M., & Haryanti, E. (2020). Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Moyo Hulu. *Jurnal TAMBORA*, 4(2A), 33–40. <https://doi.org/10.36761/jt.v4i2a.767>
- Hidayat, Endik. (2020). Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Penanggulangan pandemi COVID-19. Volume 1 Edisi 3 Universitas Pembangunan Nasional Veteran: Jawa Timur
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. 2018. Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146-154.
- Jalil, Husni, S.H., M. H., Prof. Dr. H. Husen, La Ode, S.H., M. H., Dr. R Abidin, Andi., S.H., M. H., & Syah Rezah, Farah, S.H., M. H. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Khusus*. CV. Social Politics Genius (SIGn).
- Juaningsih, I. N., Consuello, Y., Tarmidzi, A., & NurIrfan, D. (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(6), 509–518. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15363>

- Mawar, Andriyani, L., Gultom, A., & Ketiara, K., 2021, Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia. Seminar Nasional Penelitian 2021 Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Muhaimin. “Rekonstruksi Penggunaan Dana Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa.” *Jurnal Penelitian Hukum* (2020): 04
- Setyowati, Eka. (2019). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (Idm): Studi Tiga Desa Di Kabupaten Malang*. JISPO VOL. 9 No. 2 Edisi: Juli-Desember Tahun 2019
- Sanusi, Anwar. *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai– Dana Desa (BLT- Desa*. Jakarta: Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia.
- Sofyani. (2018). *Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik*. JATI Vol. 1 No. 1
- Sukmana, O. (2016). “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)”. *Jurnal Sospol*, 2, 103.
- Sulaeman, S., & Supriadi, S. (2020). Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Desa Jelantik Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Diseases–19 (Covid- 19). *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*. <https://doi.org/10.33394/jpu.v1i1.2548>.

www.bpbd.go.id

www.kemkes.go.id

www.kemendesa.go.id

www.setkab.go.id

www.hukumonline.com